

PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BERWAWASAN GENDER : SEBUAH KAJIAN DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGIS

Maria Katje Tupamahu¹

¹Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura Ambon
Email Korespondensi : mariatupamahu@gmail.com

ABSTRAK

Keterbatasan perempuan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi berdampak pada kinerja dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Program ‘pembangunan berwawasan gender’ merupakan alternative yang strategis untuk memudahkan perempuan mengakses segala hal terkait pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan berwawasan gender di kota Ambon belum maksimal dilaksanakan dan direalisasi karena masih terdapat posisi-posisi strategis yang didominasi oleh laki-laki sehingga akses perempuan terhadap potensi-potensi ekonomi dan pengambilan kebijakan masih sangat terbatas.

Kata Kunci : Perempuan, Peran, Ekonomi, Pembangunan, Gender, Wawasan

ABSTRACT

The limitations of women in accessing economic resources have an impact on the performance and role of women in nation building. The 'gender-minded development' program is a strategic alternative to make it easier for women to access everything related to women's empowerment and quality of life. The method used is qualitative approach method with observation and interview. The results showed that gender-minded development in ambon city has not been maximally implemented and realized because there are still strategic positions dominated by men so that women's access to economic potentials and policy making is still very limited.

Keywords : Women, Roles, Economy, Development, gender, Insight

PENDAHULUAN

Secara kodrati, perempuan dipandang sebagai makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan yang mempunyai tugas pokok sebagai istri dan ibu. Sebelum adanya era R. A. Kartini, perempuan diposisikan dibawah laki-laki sehingga perempuan hanyalah berperan sebagai ‘pelayan’ laki-laki dalam rumah tangga. Bukan hanya itu, perempuan juga tidak memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan sehingga makin melebarnya ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Sejarah mencatat R.A Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita yang notabene memperjuangkan hak-hak perempuan di jamannya, membuka akses perempuan terhadap pendidikan sehingga banyak perempuan di era ini mampu bersaing secara professional dengan kaum laki-laki. Pembangunan berwawasan gender yang disahkan dalam UU No 7 tahun 1984 secara tersurat menghapus segala bentuk diskriminatif perempuan sehingga perempuan

memiliki fungsi dan peran yang sejajar dengan laki-laki (Sudharta, 2012). Dengan demikian seyogyanya perempuan juga memiliki porsi yang sebanding dengan laki-laki dalam pembangunan ekonomi bangsa. Hal ini diperjelas dengan adanya perempuan yang mampu mengerjakan tugas laki-laki dan ada juga perempuan yang menjadi pimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Fenomena perempuan sudah memainkan perannya dalam pembangunan dengan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, perusahaan, dan lain-lain dirasa perlu ditilik kembali mengingat jabatan-jabatan strategis tersebut hanya dipegang oleh segelintir perempuan dan tidak sebanding dengan laki-laki. Menurut data dari Kumparan.com, hanya 5% perempuan yang menjadi pimpinan perusahaan, dan 17,3% anggota legislative. Hal ini sangat ironis mengingat secara umum, populasi perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Penelitian Tjokroaminoto dalam Rahim (2016) mengungkapkan bahwa kurangnya partisipasi wanita dalam pembangunan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 1) adanya dikotomi maskulin/feminine peran manusia secara biologis yang memarginalkan perempuan, 2) adanya dikotomi peran public dan budaya yang menunjukkan bahwa 'perempuan seharusnya di rumah'. 3) adanya konsep 'beban kerja ganda' yang mengharuskan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang seutuhnya walaupun memiliki karir, 4) adanya wawasan pemikiran yang memarginalkan perempuan dalam masyarakat. Peran perempuan dalam bermasyarakat hanya bersifat sekunder. Ruang gerak perempuan yang terbatas menimbulkan akibat dan resiko yang merugikan kaum perempuan. Namun perempuan harus mampu menghadapi resiko-resiko tersebut karena dalam dunia bisnis dan industry tidaklah semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, perempuan membutuhkan mitra atau lembaga yang mampu memberikan solusi terhadap masalah maupun resiko-resiko tersebut (Haswinar, 2017 dalam Pelamonia dan Sandanafu, 2018).

Kontribusi perempuan Maluku khususnya di kota Ambon cukup besar dalam pembangunan wilayah. Beberapa organisasi perempuan Maluku yang masih eksis hingga saat ini membuktikan bahwa perempuan Maluku memiliki semangat dalam mengembangkan diri. Diprediksi industri dan UMKM yang adalah juga penyumbang devisa bagi Negara akan terus meningkat sekitar 5% di tahun 2019. Di kota Ambon sendiri jumlah UMKM di tahun 2019 sebanyak 67.099 UMKM yang 37% dari UMKM tersebut dimiliki perempuan (Dinas koperasi dan UMKM propinsi Maluku). Data BPS Ekonomi Maluku juga menyebutkan, pada April 2019 pertumbuhan ekonomi Maluku mencapai 5,11 persen, dengan begitu dari sisi produksi pertumbuhan di dorong hampir semua lapangan usaha, termasuk didalamnya peran perempuan pengusaha di Maluku yang tergabung dalam ikaan wanita pengusaha Indonesia wilayah Maluku (IWAPI). Berdasarkan fenomena yang diutarakan diatas, maka perlu dilaksanakan kembali pembangunan berwawasan gender di wilayah Maluku khususnya di kota Ambon guna memberikan peluang yang lebih maksimal bagi perempuan dalam industrialisasi.

KERANGKA TEORETIK

Gender berbeda dengan jenis kelamin laki-laki dan wanita secara bioogis (Moore, 1998 dalam Kudiran 2002). Analisis dan penjabaran tentang gender dalam ekonomi dan sosial tidak dapat dipisahkan dari konsep keluarga. Perempuan memegang peran penting dalam keluarga, pengelolaan keuangan keluarga bertumpu pada pola dari ibu rumahtangga sehingga konsep gender dalam ekonmi tidaklah lepas dari konsep keluarga. Kesenjangan gender menurut Chavez

(1998) terjadi karena adanya ketidakseimbangan akses sumber-sumber langka dalam masyarakat. Sumber langka yang dimaksudkan adalah kekuasaan prestise, kebebasan, kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan dan juga perawatan medis. Namun, meningkatnya jumlah perempuan yang berkarir dapat berpengaruh terhadap tingkat diversitas yang terkait dengan gender sehingga secara langsung berdampak pada pertimbangan peran laki-laki dan perempuan dalam aktifitas social masyarakat (Zulaikha, 2000). Ketimpangan gender yang terjadi telah membentuk sebuah realitas social yang tanpa disadari telah dilestarikan sampai saat ini.

Contoh peran gender berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman sebagai berikut. Pada masa lalu, menyetir mobil hanya dianggap pantas dilakukan oleh pria, tetapi sekarang wanita menyetir mobil sudah dianggap hal yang biasa. Contoh lain, pada masa silam, jika wanita ke luar rumah sendiri (tanpa ada yang menemani) apalagi pada waktu malam hari, dianggap tidak pantas, tetapi sekarang sudah dianggap hal yang biasa (Sudharta, 2012).

Pengarusutamaan Gender

Secara operasional, pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai suatu pembangunan nasional yang berperspektif gender (Tim Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, 2003). Pengarusutamaan gender barulah akan memberikan hasil secara lebih memuaskan, jika dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari yang tergabung dalam lembaga pemerintah, swasta seperti organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi keagamaan dan lain-lain sampai pada unit yang terkecil yaitu keluarga. Dalam pembangunan di bidang kesehatan misalnya, kalau perencanaannya, pelaksanaannya atau pelayanannya, pemantauannya dan evaluasinya sudah berwawasan gender, maka dapat dipastikan bahwa kesehatan yang baik dapat dinikmati baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga pembangunan di bidang-bidang yang lainnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa ruang lingkup pengarus-utamaan gender meliputi empat hal, yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pengarusutamaan gender, bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program evaluasi. Dalam pelaksanaannya, masing-masing hal itu harus mempertimbangkan empat aspek, yaitu peran, akses, manfaat dan kontrol.

Pembangunan Berwawasan Gender

Pada tahun 1975 di Mexico City diselenggarakan **World Conference International Year of Woman-PBB** yang menghasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal: (1) Pendidikan dan pekerjaan, (2) Prioritas pembangunan bagi kaum perempuan, (3) Perluasan partisipasi perempuan dalam pembangunan, (4) Penyediaan data dan informasi perempuan, (5) Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin.

Untuk itu dikembangkan berbagai program pemberdayaan perempuan (**Women Empowerment Programs**). Guna mewadahi aktivitas tersebut diperkenalkan tema **perempuan dalam pembangunan (Women in Development, WID)**, yang bertujuan mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. Selain itu perempuan juga memegang peranan penting di sector pendidikan dan kesehatan. di bidang Pendidikan, Perempuan memberikan kontribusi yang sangat besar melalui tugasnya sebagai guru atau dosen. Usia guru atau dosen perempuan

Sebagian besar dibawah 40 tahun yang berarti relatif muda. Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Ali Ghufroon Mukti pernah mengatakan untuk tren dosen muda di dominasi oleh perempuan khususnya di usia 25 sampai 34 tahun dengan jumlah hamper mencapai 50.000 -- an.

Dari situ bisa dilihat dalam bidang Pendidikan perempuan mempunyai peran yang sangat besar dengan sifatnya yang bisa membangun karakter peserta didik. Untuk dibidang Kesehatan, jumlah perempuan yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan sudah lumayan banyak atau bisa dikatakan mendominasi. Dari data WHO menyebutkan bahwa wanita sudah berkontribusi dibidang Kesehatan sebesar 75% sebagai tenaga Kesehatan di wilayah pelosok. Namun menyangkut masalah tentang kesetaraan gender membuat perempuan tidak boleh bebas untuk memilih lokasi tempat bekerja dikarenakan pengaruh tuntunan sosial. Maka dari itu sangat dibutuhkan kebijakan khusus untuk membuat lingkungan pekerjaan yang baik dan waktu kerja yang fleksibel bagi perempuan. (Kompasiana.com, 2021).

Pendekatan GAD (Gender And Development)

Pada tahun 1980-an muncul pendekatan GAD (gender and development) sebagai alternatif dari WID dan WAD. GAD diharapkan bisa menjadi jawaban persoalan teoritis yang dihadapi pendekatan WID dan WAD. GAD mengakui pentingnya konstruksi sosial dari produksi dan reproduksi bagi peran dan tugas di masyarakat yang diserahkan pada perempuan. GAD bertujuan mencari mengapa perempuan mendapat peran kelas dua di banyak masyarakat dan GAD mengadopsi pendekatan holistik untuk proyek kerjanya. Subordinasi pada perempuan terjadi di ruang privat di mana perempuan di bawah kendali ayah atau suami mereka. GAD beranggapan dengan meningkatkan akses perempuan pada layanan publik bisa mengatasi persoalan subordinasi ini. Tujuan GAD adalah menolong perempuan mengorganisasi diri di dalam perilaku efektif secara politik agar mereka bisa mengatasi struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menghambat dan membatasi hidup mereka. Tujuan akhir GAD adalah mencapai pergeseran hubungan kekuasaan yang akan memberikan perempuan otonomi lebih besar (Bradley, 2006).

Pendekatan GAD mengangkat nilai peran reproduksi perempuan (melahirkan dan merawat), kerja berbayar dan kerja tak berbayar (ibu rumah tangga) yang memberikan manfaat pada rumah tangga maupun industri. Dan yang penting GAD mempertimbangan aspek umur, kelas, status perkawinan, suku, etnisitas, dan agama, GAD tidak melihat perempuan adalah semuanya sama.

METODE

Riset ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mewawancarai 5 informan terkait isu perempuan serta menggunakan sumber informasi lain yang mendukung isu penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah perempuan-perempuan yang memiliki usaha atau pengusaha perempuan di kota Ambon dan ikatan wanita pengusaha Indonesia wilayah Maluku. Dalam penelitian ini para perempuan pengusaha ini, tidak ingin disebutkan identitasnya. Lokasi penelitian bertempat di kota Ambon mengingat kota Ambon adalah pusat kegiatan ekonomi pembangunan di segala bidang yang didalamnya terdapat peran dan posisi perempuan dalam kontribusi pembangunan berwawasan gender.

DISKUSI

Peran Perempuan Dalam Organisasi

Berbagai upaya pemerintah dalam menatarakan posisi perempuan dan laki-laki di Indonesia belum terlalu berdampak atau dirasakan oleh para pelaku pembangunan di Indonesia. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, perempuan masih dimarginalkan terutama dalam pengambilan keputusan penting dalam organisasi. Berikut hasil wawancara terkait peran perempuan dalam organisasi :

Informan 1 dan 3 : Pelaku bisnis perempuan di kota Ambon)

“ Saya pribadi sebagai pendiri usaha kecil ini, tentunya akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan saya sendiri karena saya yang lebih tahu persis kondisi usaha saya. Dengan posisi saya sebagai pemilik usaha, otomatis akan memudahkan saya dalam menjalin kerjasama dengan lini usaha lain. Karena kebetulan saya masih single, jadi saya tidak membutuhkan laki-laki atau partner dalam mempertimbangkan keputusan saya. Akan tetapi jikalau saya memiliki pasangan yang juga memiliki andil dalam usaha ini, tentunya saya juga akan mempertimbangkan keputusan saya dalam artian saya perlu meninjau kembali keputusan tersebut dengan memperhitungkan pendapat partner saya (laki-laki)”.

Informan 2,4 dan 5 :

“Sulit bagi saya untuk menambil keputusan bisnis tanpa adanya campur tangan dari mitra bisnis saya. Kebanyakan dari mitra bisnis saya dalah laki-laki dan tidak diragukan lagi kalua mereka lebih mahir dan berpengalaman dalam industry ketimbang kami kaum hawa jadi menurut saya,laki-laki masih sangat dibutuhkan dalam berbagai pengambilan keputusan strategis suatu organisasi bisnis”.

Pengaruh Lingkungan dan Budaya Masyarakat

Karakter dan watak seseorang juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan tempat dia berada. Maluku terkenal dengan watak yang keras. Hal ini sangat mempengaruhi watak dan perilaku perempuan-perempuan Maluku yang notabene tidak selembut perempuan-perempuan di Indonesia bagian barat (wilayah Jawa dan sekitarnya). Namun apakah karakter tersebut mempengaruhi peran perempuan dalam industry?. Berikut ini pendapat dan pernyataan 5 informan tentang hal tersebut.

Informan 1 dan 4 :

“Kami menyadari bahwa sejatinya perempuan haruslah lembut dan lemah terhadap pria. Kami terlahir dan terbentuk di lingkungan dan budaya yang mengharuskan kami untuk berperilaku agak keras dan tegas artinya kami tidak mau dibayang-bayangi oleh laki-laki atau mengikut semua yang laki-laki perintahkan, akan tetapi kami melihat,merasakan dan

memprediksi apakah dengan mengikuti laki-laki dampaknya baik atau buruk bagi kami. Dalam hal ini kami bersyukur bahwasannya kami dilahirkan di Indonesia timur dan lingkungan yang membentuk kami menjadi pribadi yang keras, mandiri dan tegas”.

Informan 2,3 dan 5:

“ Kebetulan kami memang bertumbuh di kota Ambon yang menurut kebanyakan orang berperangai keras,kasar dan tegas. Kekerasan,kekasaran dan ketegasan inilah yang memang kami gunakan dalam bisnis,karena menurut kami, sifat dan karakter ini membuat kami tidak disepelkan oleh laki-laki. Namun bukan berarti karakter ini kami gunakan untuk menunjukan otoriter kami sebagai perempuan pemimpin tetapi kami juga menunjukan sifat lemah lembut kami sebagai sifat alami perempuan dalam menghadapi setiap persoalan dalam bisnis kami sehingga pengambilan keputusan akan terasa adil dan menguntungkan kami”.

Pembangunan berwawasan gender,masih bisakah berlanjut?

Fenomena ketidaksetaraan gender yang masih bergaung sampai saat ini telah menjadi focus pemerintah dalam meminimalisir ketimpangan tersebut. Salah satu cara yang sampai saat ini diterapkan pemerintah yakni pembangunan berwawasan gender. Sudah efektifkah program ini? Apakah perempuan sudah benar-benar merasakan keadilan disetiap segi kehidupan? Berikut adalah pandangan informan terkait pembangunan berwawasan gender saat ini. Semua Informan :

“Sampai saat ini,jujur saja,kami belum merasakan pemerataan terkait akses ke dunia industry dimana kami sangat terbatas dalam hal kemampuan,skill,pengalaman dan pendidikan disbanding laki-laki sehingga haruslah menjadi catatan pemerintah bahwa kami perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan,skil dan penguasaan teknologi agar kami bisa sama2 berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan dan bisa menjadi pengambil keputusan dalam organisasi seperti halnya laki-laki. Pemerintah haruslah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk mengaktualisasikan diri di segala bidang karena perempuan sangat berpotensi dan perempuan juga merupakan asset bangsa. Pembangunan berwawasan gender harus benar-benar diaktualisasi secara baik dan tegas agar tidak terjadi lagi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kontribusi dalam pembangunan. Bukan hanya pemerintah saja, tetapi tolonglah dilibatkan pihak-pihak luar untuk bersama-sama mewujudkan dan mengeksplor potensi perempuan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan”.

KESIMPULAN

Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia dan Maluku pada khususnya tentang peran perempuan dalam pembangunan, ada beberapa hal yang sangat krusial yang harus diperhatikan agar perempuan dapat terus memainkan perannya yakni gerakan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender akan memicu perempuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.dan Pendampingan dan pembinaan pihak luar (stakeholders) baik dari segi pendanaan

maupun pendampingan merupakan langkah penting untuk mensinergikan UMKM yang dikelola perempuan dengan pihak terkait di Maluku. IWAPI akan lebih pro aktif dalam mengkordinasi UMKM perempuan di wilayah Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bradley, Tamsin. 2006. *Challenging the NGOs: Women, Religion and Western Dialogues in India*. London dan New York: Tauris Academic Studies.
- Chafetz, Zalmhan. (1991). *The gender division of labour and reproduction of female disadvantages toward integrated theory*. Nerbury Park: Sage publication
- Dinas Koperasi dan UMKM propinsi Maluku. (2018). *Paparan rakornas koperasi dan UMKM propinsi Maluku*.
- Kebijakan dan strategi PPEP, (2012). *Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*
- Koediran, dkk. (2002). *Peningkatan partisipasi wanita dan hubungan industrial berwawasan gender di kawasan Indonesia Timur*. Humaniora, Vol 14 no.(3)
- Kompasiana.com. 2020. *Peran Perempuan dalam Pembangunan SDM di Indonesia*. Diakses 08 Oktober 2020
- Pelamonia, Julie dan Sandanafu, Sally. 2018. *Technophobia, Gender dan Karakter Personal Tenaga Pendidik Akuntansi di SMU/SMK di Kota Ambon*. *Jurnal Maneksi* Vol 2 No
- Sudharta, Wayan. (2012). *Peranan wanita dalam pembangunan berwawasan gender*. *Jurnal Bali Zulaikha* (2000). *Pengaruh kesadaran gender wanita pedesaan dan pengaruhnya pada partisipasi mereka dalam koperasi*. *Jurnal Undip*
- <http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/2009/06/15/eksklusi-sosial-gender-dan-pembangunan/>. Diakses, 15 Maret 2020